

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004)

Bertitik tolak dari krisis ekonomi, nampak jelas bahwa sektor pertanian dan pedesaan perlu diarahkan menjadi penggerak utama dan sektor andalan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian diyakini mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional dan sekaligus mengatasi masalah pemerataan dan pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan (Sudaryanto.T, dkk, 2000). Selama krisis ekonomi, secara keseluruhan ekonomi nasional selama tahun 1998 mengalami kontraksi sebesar 13,68 %. Namun di tengah krisis ekonomi ini sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan 0,22 % (BPS. 1999). Pada tahun 1968 – 1990, PDB sektor pertanian tumbuh dengan laju 4% per tahun

dan pada tahun 1990 – 1997 turun menjadi 2%. Sekarang ini perekonomian sudah kembali menguat, ditandai dengan semakin rendahnya tingkat inflasi (di bawah 10%) dan pertumbuhan ekonomi antara 5 – 6% per tahun (BPS, 2009).

Salah satu masalah yang cukup serius dihadapi Indonesia dewasa ini adalah masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang saat ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan. Jumlah penganggur dan setengah penganggur mengalami peningkatan. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Meningkatnya angka pengangguran disebabkan karena adanya ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Adanya kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja tersebut berdampak terhadap perpindahan tenaga kerja (migrasi) baik secara spasial antara desa-kota maupun secara sektoral. Hal ini sejalan dengan pernyataan Todaro (2000) yang menjelaskan bahwa terjadinya perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar antara desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk datang dan mencari pekerjaan di kota.

Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Seseorang menganggur memungkinkan yang bersangkutan bertindak di luar batas yang dapat merugikan orang lain, melanggar aturan maupun norma serta nilai yang berlaku. Oleh sebab itu perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi. (Sukidjo, 2005)

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan demikian kesempatan kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita mengakibatkan semakin cepat perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia (Tambunan, 2001).

Perekonomian suatu kawasan dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung naik. Namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Sebagai contoh dengan adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan

penurunan ekspor. Semua itu dapat mengakibatkan perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi (Arsyad Lincolin, 1992: 16).

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan sekali data mengenai jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Provinsi Jawa Tengah saat ini memiliki 29 Kabupaten dan 6 Kota yang tentunya memiliki berbagai masalah yang harus diatasi seperti masalah pengangguran. Sebagai wilayah yang padat penduduknya, aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan serta penciptaan lapangan pekerjaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, agar tujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dapat tercapai.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan. *Pertama*, kita dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja. *Kedua*, kita dapat mengetahui jumlah pengangguran dan pencari kerja. *Ketiga*, apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja. *Keempat*, dilihat dari statusnya dapat terlihat berapa jumlah penduduk, yang bekerja di sektor informal. *Kelima*, pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas

SDM yang akan dapat meminimalkan jumlah pengangguran di suatu Negara. Hal ini penting karena tingginya angka pengangguran di suatu negara akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat misalnya meningkatnya kriminalitas (Soebagyo, 2015)

**Tabel 1.1**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama,**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010–2014 (Juta Orang)**

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1. Angkatan Kerja	Juta orang	16.856.330	17.026.107	17.513.488	17.524.022	17.547.026
- Bekerja	Juta orang	15.809.447	15.822.765	16.531.395	16.469.960	16.550.682
- Pengangguran	Juta orang	1.046.883	1.203.342	982.093	1.054.062	996.344
2. Bukan Angkatan Kerja	Juta orang	7.018.255	7.244.607	7.062.143	7.357.786	7.634.941
- Sekolah	Juta orang	1.669.676	1.697.753	1.735.985	1.526.977	1.949.253
- Mengurus RT	Juta orang	3.985.150	4.275.920	4.167.367	4.436.765	4.361.129
- Lainnya	Juta orang	1.363.429	1.270.934	1.158.791	1.394.044	1.324.559
3. Jumlah Penduduk 15+	Juta orang	23.874.585	24.270.714	24.575.631	24.881.808	25.181.967
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,60	70,15	71,26	70,43	69,68
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,21	7,07	5,61	6,01	5,68

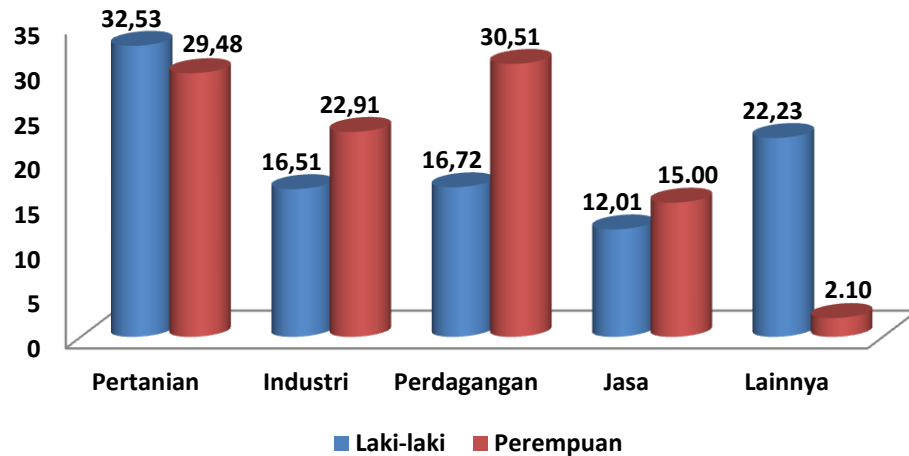
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada tahun 2010-2014 bervariasi, yaitu adanya perubahan yang digambarkan dengan cenderung meningkatnya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun, serta peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Walaupun di tahun 2013 angka pengangguran sempat meningkat menjadi 1.054 dibanding tahun sebelumnya 2012 hanya 982,09. Tetapi, pada tahun 2014 angka pengangguran berhasil turun menjadi 996,34. Hal ini pun terjadi pada jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 16.469 dibanding tahun sebelumnya 2012 yaitu 16.531 ini dikarenakan jumlah pengangguran yang meningkat, kemudian di tahun 2014 jumlah penduduk yang bekerja kembali meningkat menjadi 16.550.

Pembangunan ekonomi selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan, oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara merupakan unsur utama dalam pembangunan. Paradigma pembangunan yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara berkembang di dunia memiliki masalah yang krusial, dimana jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja akan menyebabkan terjadinya masalah pengangguran yang dapat membebani anggaran negara. Maka lapangan kerja yang memadai dianggap penting demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. (Sulistiawati, 2012 : 196).

Setiap sektor perekonomian atau lapangan pekerjaan memiliki daya serap tenaga kerja dan laju pertumbuhan yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja serta terjadinya perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun perannya dalam pendapatan nasional (Simanjutak, 1998).

**Gambar 1.1**  
**Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, di Jawa**  
**Tengah Agustus 2014**



Sumber: SAKERNAS Agustus 2014

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa menurut jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki yang bekerja pada sektor pertanian sekitar 32,53 persen sedangkan proporsi penduduk perempuan yang bekerja di sektor yang sama sekitar 29,48 persen. Kondisi yang berbeda terjadi pada sektor perdagangan. Proporsi penduduk perempuan yang bekerja di sektor perdagangan justru lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki yang bekerja di sektor yang sama, yaitu masing-masing sebesar 30,51 persen dan 16,72 persen. Demikian halnya pada sektor industri. Proporsi penduduk perempuan yang bekerja pada sektor ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 22,91 persen berbanding 16,51 persen.

Dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi masalah pengangguran, masalah laju pertumbuhan perlu diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB yang adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode, yang merupakan salah satu indikator yang penting, dalam menilai kinerja suatu perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk. Pada dasarnya diantara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesempatan kerja yang tercipta juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi selalu dipakai sebagai ukuran terciptanya lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhous, 1992:78).

**Tabel 1.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Indeks Perkembangan (Persen)
<b>2010</b>	623.224.621,33	100,00
<b>2011</b>	658.003.645,36	111,13
<b>2012</b>	690.461.017,10	121,07
<b>2013</b>	726.652.111,09	133,18
<b>2014</b>	763.219.714,00	148,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dalam kurun 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan PDRB setiap tahunnya, kemudian diikuti dengan indeks perkembangan yang juga terus meningkat. Kondisi demikian yang menarik



untuk dikaji lebih dalam, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari pertumbuhan PDRB dengan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kondisi lain dapat dilihat dari tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara yang merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi laju inflasi. Menurut Sukirno (1994:38), bahwa dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja.

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. (BPS, 2015)

**Tabel 1.3**  
**Inflasi Jawa Tengah dan Enam Kota di Jawa Tengah**  
**Tahun 2010-2014**

Wilayah Jateng	Inflasi				
	2010	2011	2012	2013	2014
Provinsi Jawa Tengah	6,88	2,68	4,24	7,99	8,22
Kota Magelang	6,80	4,15	6,05	7,79	7,92
Kota Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01
Kota Salatiga	6,65	2,84	4,12	7,67	7,84
Kota Semarang	7,11	2,87	0,41	8,19	8,53
Kota Pekalongan	6,77	2,45	3,55	7,4	7,82
Kota Tegal	6,73	2,58	0,4	5,8	7,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa inflasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Bahkan pada 2014, nilai inflasi mencapai angka 8,22 persen. Penyumbang terbesar dari naiknya inflasi Jawa Tengah secara umum ada pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Penyumbang terbesar kedua adalah kelompok bahan makanan disusul kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Kenaikan inflasi yang cukup tinggi di beberapa kelompok pengeluaran disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kenaikan harga BBM, kenaikan cukai rokok, serta harga sarana telekomunikasi yang semakin mahal. Selain hal itu juga dipicu oleh kenaikan tarif dasar listrik pada bulan Juli, September dan November 2014. Sementara penurunan harga BBM di penghujung tahun 2014 baru akan berdampak beberapa bulan kemudian. Namun berdasarkan pengalaman, harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik akan sulit untuk diturunkan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Kapasitas keuangan daerah ditunjukkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan. Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua pengeluaran daerah di sisi yang lain. Sebelum tahun 2003 APBD dari sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan (Suyana Utama 2009).

Beberapa kajian teoritis mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk memperluas kesempatan kerja adalah melalui pengembangan industri terutama industri yang bersifat padat karya. Pengembangan Industri tersebut akan menyebabkan kapasitas produksi meningkat sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja. Selain Investasi swasta terdapat Investasi pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah ini berupa pengeluaran pembangunan pemerintah dan alokasi anggaran pembangunan sektoral merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah, mungkin juga bagian dari permintaan agregat sehingga timbulnya permintaan yang berasal dari APBD di Jawa Tengah akan berdampak positif

terhadap tambahan output. Tambahan output ini akan menyebabkan tambahan kesempatan kerja karena banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output melalui kebijakan publik dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran. Melalui pengeluaran pembangunan pemerintah diharapkan mampu mempengaruhi besarnya kesempatan kerja dalam perekonomian (Suparmoko, 1994).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Belanja Daerah terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014”*

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014?
3. Bagaimana pengaruh belanja daerah terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014.
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kesempatan kerja pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja daerah terhadap penciptaan kesempatan kerja.
2. Sebagai masukan/input bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya BAPPEDA dan SKPD terkait lainnya dalam mengambil keputusan maupun kebijakan mengenai rencana peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.
3. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti.

4. Diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan khususnya praktisi ekonomi, terutama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam menganalisis pengaruh dari produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja daerah terhadap kesempatan kerja penelitian ini menggunakan analisis data panel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak dapat secara langsung yaitu data yang diambil dari penelitian terdahulu maupun perpustakaan yang di publikasikan. Penelitian ini menggunakan gabungan dari data *cross section* 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data *time series* selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014 sehingga dalam penelitian ini ada 175 observasi. Gabungan dari cross section dan time series di sebut data panel. Data diperoleh dari Jurnal, website, perpustakaan, penelitian-penelitian terdahulu dan instansi terkait seperti BPS, BAPPEDA dan instansi lainnya.

Data panel adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis dengan data silang tempat yang memiliki observasi-observasi pada suatu unit analisis pada titik waktu tertentu.

Dalam penelitian ini kesempatan kerja merupakan variabel terikat sedangkan produk domestik regional bruto, inflasi dan belanja daerah dinyatakan sebagai variabel bebasnya.

Penulis melakukan replikasi model milik :

Siestri Pristina Kairupan, tahun 2013, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4

A Bashier Al-Abdulrazag 2013, *The Determinants of Employment in Jordan : A Time Series Analysis*. *International Review of Management and Business Research*. Vol.2 Issue.4

Dengan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathbf{EMP}_{it} = \alpha + \beta_1 \mathbf{PDRB}_{it} + \beta_2 \mathbf{INF}_{it} + \beta_3 \mathbf{BD}_{it} + \mathbf{u}_{it}$$

Dimana:

$\mathbf{EMP}_{it}$  : Kesempatan kerja pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

$\mathbf{PDRB}_{it}$  : Produk domestik regional bruto pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

$\mathbf{INF}_{it}$  : Inflasi pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

$\mathbf{BD}_{it}$  : Belanja daerah pada unit daerah ke-i dan unit waktu ke-t

$i$  : Menunjukkan Kabupaten/Kota

$t$  : Menunjukkan deret waktu (tahun 2010-2014)

$\alpha$  : koefisien intersep atau konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang hubungan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

$u$  : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar Penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas landasan teori yang merupakan dasar teoritis penelitian, pengertian tentang kesempatan kerja, pengertian produk domestik regional bruto, pengertian inflasi, pengertian belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta uraian hipotesis dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memberikan penjelasan tentang variabel penelitian dan operasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta penjelasan tentang metode pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis yang digunakan.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi sampel penelitian. Serta pembahasan dari hasil penelitian yang meliputi variabel yang paling berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan analisis data yang menitik



beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, dalam bab ini juga akan diuraikan interpretasi hasil.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir penulisan yang berisi mengenai simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi pada bab IV serta saran – saran yang perlu disampaikan bagi pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan suatu permasalahan yang akan diteliti atau penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**